

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian merupakan suatu tindakan untuk mengubah kondisi pertanian dari kondisi yang kurang menguntungkan menjadi kondisi yang lebih menguntungkan (*long term and sustainability*). Pembangunan pertanian berkelanjutan sangat tergantung kepada ketersediaan sumber daya dan pelaku di dalam pembangunan pertanian dalam mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh. A.T. Mosher (1983) dalam Arifin (2005) berpendapat bahwa pembangunan pertanian adalah usaha untuk meningkatkan produksi pertanian baik kuantitas maupun kualitas, sedangkan menurut Arifin (2005), pembangunan pertanian adalah kegiatan yang memiliki tiga dimensi yaitu pertumbuhan pertanian, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Pembangunan pertanian yang baik untuk Negara Indonesia adalah pembangunan pertanian yang memiliki pertumbuhan konsisten. Konsistensi pertumbuhan yang dimaksud adalah pembangunan pertanian yang dilakukan tidak boleh mengganggu sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya, agar pembangunan pertanian dapat berjalan secara berkelanjutan. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan sebaiknya dilakukan secara

merata, agar dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan (Arifin, 2005).

Pembangunan pertanian tetap memegang peran strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio energi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara dan sumber pendapatan serta pelestarian lingkungan melalui praktik usahatani yang ramah lingkungan. Pembangunan pertanian diharapkan dapat memperbaiki pendapatan penduduk secara merata dan berkelanjutan, karena sebagian besar penduduk Negara Indonesia memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Sejalan dengan target utama Kementerian Pertanian 2010-2014 meliputi: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; (4) peningkatan kesejahteraan petani. Strategi yang akan dilaksanakan adalah melakukan revitalisasi pertanian dengan fokus terhadap tujuh aspek dasar yaitu: (1) lahan; (2) perbenihan dan perbibitan; (3) infrastruktur dan sarana; (4) sumber daya manusia; (5) pembiayaan petani; (6) kelembagaan petani; (7) teknologi dan industri hilir (Kementan,2014).

Menurut Ashari (2009), walaupun perannya sangat strategis sektor pertanian masih menghadapi banyak permasalahan, diantaranya keterbatasan permodalan petani dan pelaku usaha pertanian lain. Permasalahan mendasar bagi pengembangan usaha pertanian adalah lemahnya permodalan pelaku usaha pertanian baik dalam pemilikan maupun akses terhadap permodalan

melalui lembaga keuangan perbankan. Lemahnya kepemilikan modal disebabkan oleh kecilnya skala usaha sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan akumulasi modal, sementara lemahnya akses petani kecil terhadap lembaga keuangan perbankan disebabkan oleh prosedur dan persyaratan yang tidak sederhana yang harus dipenuhi oleh petani. Di sisi lain pihak perbankan sendiri kurang tertarik untuk membiayai sektor pertanian yang dipandang berisiko tinggi, baik karena gangguan alam seperti banjir dan kekeringan, serangan hama dan penyakit tanaman, maupun fluktuasi harga.

Kebutuhan pembiayaan di sektor pertanian dapat dipenuhi melalui lembaga keuangan non perbankan, selain kelembagaan keuangan perbankan. Lembaga keuangan non perbankan yang ada di masyarakat dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat, khususnya bagi petani yang menggunakan jasa pinjaman tersebut. Dampak positif dari lembaga keuangan non perbankan yaitu proses pencairan dana yang cepat karena tidak memerlukan administrasi yang panjang. Dampak negatif dari lembaga keuangan non perbankan yaitu petani yang meminjam modal ke pedagang besar (tengkulak) diharuskan menjual hasil panennya kepada pedagang besar (tengkulak) tersebut, sehingga petani memiliki keterbatasan pasar untuk menjual hasil panennya. Jika petani dapat menjual hasil panennya selain ke perdagangan besar (tengkulak), maka petani dapat memperoleh kebebasan pasar yang akan berpengaruh pada penentuan harga jual gabahnya.

Berdasarkan hal tersebut, muncul permasalahan yaitu petani tidak memiliki kebebasan pasar untuk menjual hasil panennya, sehingga petani tidak

memiliki kekuatan dalam penentuan harga jual gabah. Permasalahan lainnya yaitu masih rendahnya alokasi kredit untuk sektor pertanian jika dibandingkan dengan alokasi kredit untuk sektor lainnya. Alokasi kredit oleh bank umum untuk berbagai sektor ekonomi, salah satunya pertanian pada Tahun 2008-2011 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kredit Bank Umum Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2008-2011 (dalam Presentase)

No	Sektor Ekonomi	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Pertanian, perburuhan, dan sarana pertanian	5	5	5	5
2	Pertambangan	2	3	3	4
3	Perindustrian	21	1	16	16
4	Listrik, Gas dan Air	1	2	2	2
5	Konstruksi	4	4	4	3
6	Perdagangan, restoran dan hotel	20	21	19	18
7	Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	5	5	4	4
8	Jasa Dunia Usaha	12	10	10	10
9	Jasa Sosial	1	1	3	3
10	Lain-lain	28	31	34	34
Jumlah		100	100	100	100

Sumber: Bank Indonesia, 2013.

Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia pada Tabel 1, dapat diketahui besarnya alokasi kredit bank umum untuk sektor pertanian, perburuhan, dan sarana pertanian masih rendah jika dibandingkan dengan sektor lain-lain, perindustrian, perdagangan, restoran dan hotel, dan jasa dunia usaha. Tinggi rendahnya alokasi kredit untuk sektor pertanian berhubungan erat dengan ketersediaan modal petani. Permasalahan di sektor pertanian tersebut, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan di sektor pertanian yang bertujuan untuk membantu permodalan petani. Salah satu

kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan yaitu subsidi terhadap bunga kredit bank yang diwujudkan dalam Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).

Keberhasilan peningkatan produksi pangan di masa lalu dalam pencapaian swasembada pangan, tidak terlepas dari peran pemerintah melalui penyediaan kredit program dengan suku bunga rendah dan fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia maka tidak tersedia lagi sumber dana dari KLBI. Pemerintah bekerjasama dengan perbankan pada tahun 2000 menerbitkan Skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang telah mengalami penyesuaian menjadi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) sejak Bulan Oktober 2007.

KKP-E merupakan kredit modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan di Indonesia. Program Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014 difokuskan pada lima komoditas utama yaitu padi (beras), jagung, kedelai, tebu (gula) dan daging sapi. Dalam rangka mencukupi kebutuhan bahan pangan utama dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor pangan maka pemerintah mencanangkan program pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Upaya pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan untuk sub sektor tanaman pangan ditempuh melalui peningkatan produktivitas hasil, perluasan areal tanam, pengamanan produksi, program peningkatan kesejahteraan petani, dukungan pembiayaan petani salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan KKP-E.

Pemerintah menunjuk 22 bank sebagai bank pelaksana KKP-E yang terdiri dari sembilan bank umum dan 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Salah satu bank pelaksana KKP-E adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Komitmen dan rencana tahunan penyaluran KKP-E berdasarkan bank pelaksana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Komitmen dan Rencana Tahunan Penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Berdasarkan Bank Pelaksana (Rp Juta)

No	Bank Pelaksana	Total	
		Komitmen	RTP
1	BRI	5.983.000	5.983.000
2	BNI	618.350	326.700
3	Bank Mandiri	480.000	35.000
4	Bukopin	735.000	425.500
5	BCA	55.000	20.000
6	Bank Agroniaga	423.000	190.500
7	BII	105.000	55.000
8	Bank CIMB Niaga	190.000	-
9	BPD Sumut	19.165	4.000
10	BPD Nagari	90.000	25.000
11	BPD Sumsel	20.000	20.000
12	BPD Jabar	98.000	30.150
13	BPD Jateng	82.750	72.382
14	BPD DIY	15.025	32.000
15	BPD Jatim	356.000	85.000
16	BPD Bali	261.905	253.000
17	BPD Sulsel	1.000	1.000
18	BPD Kalsel	6.485	8.340
19	BPD Papua	55.000	30.000
20	BPD Riau	35.000	75.000
21	BPD NTB	8.062	7.617
22	BPD Jambi	12.700	-
	Jumlah	9.650.442	7.679.189

Sumber: Kementerian Pertanian, 2014.

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui komitmen dan rencana tahunan penyaluran KKP-E per bank. Bank BRI mempunyai komitmen dan

penyaluran tertinggi dibandingkan dengan bank lainnya. Pada Tahun 2013 penyaluran KKP-E tertinggi di Provinsi Lampung terdapat di BRI Cabang Pringsewu jika dibandingkan dengan BRI cabang lainnya, dilihat dari banyaknya kelompok tani yang mengakses KKP-E sebanyak 20 kelompok tani dan peternak. Kelompok tani dapat mengakses KKP-E untuk berbagai komoditas, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan dan pengadaan pangan. Berikut adalah alokasi plafon KKP-E untuk masing-masing sub sektor pertanian yang tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi Plafon Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Per Sub Sektor.

No	Sub sector	Alokasi (Rp)	Persentase
1	Tanaman pangan	2,284 trilyun	23.70%
2	Hortikultura	737,530 milyar	7.60%
3	Perkebunan	3,384 trilyun	35.10%
4	Perternakan	2,931 trilyun	30.40%
5	Pengadaan Pangan	312,890 milyar	3.20%
	Jumlah	9,650 trilyun	100%

Sumber: Kementerian Pertanian, 2014.

Data pada Tabel 3 diperoleh dari pedoman teknis KKP-E, berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa alokasi plafon KKP-E untuk sub sektor tanaman pangan memiliki presentase sebesar 23,70% atau sebesar Rp 2,284 trilyun dari alokasi KKP-E secara keseluruhan sebesar 9,650 trilyun. Alokasi plafon KKP-E untuk sub sektor tanaman pangan salah satunya di alokasikan untuk tanaman padi. Padi menjadi pangan yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Indonesia. Padi (beras) merupakan makanan pokok bagi sebagian

besar penduduk Indonesia. Komoditas ini dianggap memiliki peranan yang strategis dalam mencapai ketahanan pangan di Indonesia.

Indonesia sebagai negara agraris memiliki peran penting dalam memproduksi padi. Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi penghasil padi di Indonesia. Padi menjadi komoditas pangan unggulan di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki 13 kabupaten dan dua kota, salah satunya adalah Kabupaten Pringsewu. Mata pencaharian utama masyarakat di Kabupaten Pringsewu yaitu bertani dan berdagang. Data mengenai luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Luas Panen, Produksi, Produktivitas Padi Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2012.

No	Kabupaten/Kota	Padi Sawah		
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Lampung Barat	38.773	177.81	4,59
2	Tanggamus	40.114	212.317	5,29
3	Lampung Selatan	76.108	399.9	5,25
4	Lampung Timur	94.417	492.315	5,21
5	Lampung Tengah	125.37	656.886	5,24
6	Lampung Utara	30.179	139.319	4,62
7	Way Kanan	30.15	137.161	4,55
8	Tulang Bawang	40.62	187.044	4,6
9	Pesawaran	28.864	151.96	5,26
10	Pringsewu	21.453	113.357	5,28
11	Mesuji	31.35	144.924	4,62
12	Tulang Bawang Barat	14.354	66.226	4,61
13	Pesisir Barat	-	-	-
14	Bandar Lampung	1.261	6.826	5,41
15	Metro	4.233	4.233	5,33

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2013.

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa Kabupaten Pringsewu menempati urutan ke empat terbesar dalam produktivitas padi sawah setelah Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Tanggamus yang masing-masing memiliki produktivitas sebesar 5,41 ton/ha, 5,33 ton/ha, dan 5,29 ton/ha. Besarnya produktivitas padi di suatu wilayah tentu tidak terlepas dari penggunaan *input* yang tepat dan baik. Penggunaan *input* yang baik seperti benih unggul dapat membantu petani dalam meningkatkan produksi tanaman padinya, untuk dapat menggunakan benih unggul, petani membutuhkan tambahan modal karena benih unggul memiliki harga yang relatif lebih mahal. Program KKP-E dapat membantu petani padi untuk memperoleh modal bagi usahatannya. Pada akhirnya diharapkan ada hubungan yang positif antara besarnya alokasi dana KKP-E untuk sektor tanaman pangan terhadap peningkatan produksi dan produktivitas padi di Kabupaten Pringsewu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan modal KKP-E oleh petani di Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana keragaan usahatani padi petani penerima KKP-E dan petani bukan penerima KKP-E di Kabupaten Pringsewu?
3. Bagaimana perbedaan pendapatan usahatani petani penerima KKP-E dan petani bukan penerima KKP-E di Kabupaten Pringsewu?
4. Bagaimana kinerja anggota kelompok tani di Kabupaten Pringsewu?

5. Bagaimana persepsi petani terhadap KKP-Edi Kabupaten Pringsewu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pemanfaatan modal KKP-E oleh petani di Kabupaten Pringsewu.
2. Menganalisis keragaan usahatani padi petani penerima KKP-E dan petani bukan penerima KKP-E di Kabupaten Pringsewu.
3. Menganalisis perbedaan pendapatan usahatani padi petani penerima KKP-E dan petani bukan penerima KKP-E di Kabupaten Pringsewu.
4. Menganalisis kinerja anggota kelompok tani di Kabupaten Pringsewu.
5. Mengetahui persepsi petani terhadap KKP-E di Kabupaten Pringsewu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Bagi pemerintah atau instansi terkait, sebagai sarana evaluasi keberhasilan KKP-E yang dilaksanakan oleh BRI Cabang Pringsewu dan pengaruhnya terhadap usahatani padi di Kabupaten Pringsewu.
2. Bagi petani, sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penggunaan modal KKP-E, serta sebagai informasi dalam pemanfaatan KKP-E sebagai akses permodalan usahatani padi.
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, acuan, bahan perbandingan serta informasi dalam melihat pengaruh KKP-E terhadap usahatani padi di waktu yang akan datang.